OMBUDSMAN KALSEL PANTAU LAYANAN HAJI PASTIKAN HAK JAMAAH TERPENUHI

Senin, 18 Mei 2026 - kalsel

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan layanan ibadah haji 2026 guna memastikan kualitas pelayanan bagi jamaah itu terpenuhi.

Pemantauan tersebut difokuskan pada efektivitas layanan dasar jamaah, termasuk akses kesehatan, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan, dengan perhatian khusus pada jamaah lanjut usia, uzur, dan penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman bersama jajaran berdialog langsung dengan jamaah, sementara pihak yang turut mendampingi melalui Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan Eddy Khairani beserta jajaran di Banjarbaru, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan fasilitas di asrama haji telah menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas layanan publik bagi jamaah calon haji."Dengan adanya gedung yang baru ini sangat membantu para jamaah dalam mengakses berbagai layanan di asrama haji," ujarnya.

Dia juga menambahkan layanan yang semakin tertata mencerminkan komitmen peningkatan pelayanan yang lebih humanis dan mudah diakses oleh seluruh kelompok jamaah.Eddy Khairani menyebutkan kehadiran Ombudsman menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan."Kami menyampaikan terima kasih atas masukan Ombudsman Kalsel yang menjadi dorongan bagi kami untuk terus melakukan pembenahan layanan," kata dia.

Dia menjelaskan sinergi antar-instansi menjadi kunci dalam memastikan standar pelayanan ibadah haji dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan tersebut juga disoroti sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan standar layanan, pengelolaan pengaduan, serta penyediaan fasilitas darurat bagi jamaah rentan seperti tombol panic button di area toilet.

Melalui pengawasan ini, diharapkan kualitas layanan ibadah haji semakin akuntabel dan responsif, sejalan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah di tingkat embarkasi.